

Analisa Laporan Realisasi Anggaran RSUD Prov. NTB dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi, Efektivitas dan Efisiensi Keuangan BLUD Tahun 2020-2022

Nabila Izzaturrahmah Marasabessy¹, Sonny Fransisco Siboro², Nisa Hanifah³, Raihan Syahrain⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Sarana Informatika

Korespondensi penulis: izzaturrahmahmarssy@gmail.com¹

Abstract. This research uses quantitative descriptive analysis to collect data, compare it with regulations, examine the advantages and disadvantages of the budget preparation process and realization reports, and draw conclusions. Results of calculations of economic ratios, efficiency and effectiveness of BLUD RSUD Prov. NTB for 2020-2022 is presented in tabular form. This discussion includes a comparison of economic ratios, efficiency and effectiveness for the relevant budget year. Analysis of the provincial hospital budget realization report. NTB is carried out to increase the economic value, effectiveness and financial efficiency of BLUDs with a focus on good governance and value for money. The analytical method used is descriptive analysis using secondary data from the Renja document and the Provincial Regional Hospital BLUD Budget Realization Report. NTB. This research aims to understand the process of preparing budgets and realization reports for the Provincial Regional Hospital. NTB to achieve community welfare through effective and efficient public sector budget management. By paying attention to economic ratios, efficiency and effectiveness in budget implementation, RSUD Provincial. NTB can identify areas that need to be improved to achieve better financial performance and provide optimal health services to the community.

Keywords: Budget Realization Reports, Public Sector Accounting, Value For Money

Abstrak. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengumpulkan data, membandingkannya dengan peraturan, meneliti kekurangan dan kelebihan proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi, serta mengambil kesimpulan. Hasil perhitungan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas BLUD RSUD Prov. NTB tahun 2020-2022 disajikan dalam bentuk tabel. Pembahasan ini meliputi perbandingan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Analisa laporan realisasi anggaran RSUD Prov. NTB dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi, efektivitas, dan efisiensi keuangan BLUD dengan fokus pada *good governance* dan *value for money*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari dokumen Renja dan Laporan Realisasi Anggaran BLUD RSUD Prov. NTB. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi RSUD Prov. NTB guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran sektor publik yang efektif dan efisien. Dengan memperhatikan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran, RSUD Prov. NTB dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Kata kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Akuntansi Sektor Publik, Value For Money

LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang memberikan fasilitas kesehatan masyarakat terbaik, adalah salah satu bagian dari badan pemerintah tingkat regional/daerah yang dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selama bertahun-tahun, teknologi yang berkembang, dan bidang layanan kesehatan juga terkena konsekuensi rangkaian ini. Dunia kesehatan bertambah maju, tetapi masalah pengambilan keputusan juga meningkat. Tahun 2020, Pandemi COVID-19 berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan banyak

industri, termasuk sektor keuangan, di berbagai wilayah dan bahkan di seluruh negara. Karena pandemik dianggap sebagai sanggahan besar, tentu saja penting untuk membuat rancangan yang akan menjadi tumpuan dalam bersikeras bahkan melawan keadaan yang tidak menentu yang disebabkan oleh pandemi. Untuk meningkatkan tingkat pentingnya, dibuat perhitungan yang berisi rancangan dan taktik untuk menghadapi pandemi, yang harus disesuaikan dengan keadaan saat ini hendaknya berhasil menjadi pijakan untuk permanen bertahan bahkan melawan setiap hal yang bisa merusak. Untuk merencanakan dan membiayai semua kebutuhan, pengelolaan keuangan sangat penting. Ini memastikan bahwa rencana tersebut dilaksanakan. Dalam hal penetapan anggaran, biaya yang terkait dengan program RSUD tidak diperhitungkan, jadi biaya harus dialokasikan dengan benar untuk menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan. Penelitian penulis dengan judul **“Analisa Laporan Realisasi Anggaran RSUD Provinsi NTB: Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi, Efektifitas, dan Efisiensi Kinerja Keuangan BLUD”** didasarkan pada konteks ini.

Seluruh pelaksana keuangan negara harus memenuhi kewajiban laporan pertanggungjawaban pelaksana keuangan yang bertambah luas dan tepat waktu dalam upaya nyata untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan kewajiban keuangan yang diimplikasikan harus dilakukan dalam format laporan keuangan yang sekurang-kurangnya termasuk dari neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan dan disusun berdasarkan SAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan laporan dan realisasi anggaran di RSUD Prov. NTB.

KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Sektor Publik

(Mardiasmo, 2002) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah akuntansi terkait dengan cara akuntansi yang digunakan di sektor publik. Pemerintah (Pusat, Daerah, dan departemen kerja pemerintah), perusahaan kepunyaan negara (BUMN dan BUMD), Yayasan, organisasi politik, organisasi massa, Lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lain adalah contoh domain publik. (Bastian, 2006) mendefinisikan akuntansi sektor publik selaku metode dan analisa akuntansi yang digunakan untuk mengelola dana khalayak di Lembaga negara tinggi dan divisi-divisi di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, serta rencana kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Anggaran

Anggaran adalah rancangan keuangan untuk tahun berikutnya yang meliputi perkiraan manajemen tentang penghasilan, biaya, dan transaksi lain. Anggaran organisasi sektor publik meliputi rancangan tentang berapa banyak dan berapa biaya rencana tersebut, serta metode untuk mendapatkan dana untuk mendukungnya. Anggaran yang kurang efisien dan tidak mengarah pada kemampuan dapat menggagalkan rencana yang sudah dirumuskan sebelumnya. Seringkali, perumusan anggaran dianggap sebagai bagian yang berbeda dari perumusan dan perancangan program, maka kesuksesan implementasi anggaran tidak seiring dengan keberhasilan rancangan dan intensi organisasi. Bagian penataan anggaran merupakan bagian yang sangat penting. Perhitungan semacam ini tidak dapat menciptakan anggaran manajemen yang efisien untuk mencapai target perusahaan.

Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jenisnya: anggaran operasional, yang mencakup kegiatan yang paling penting untuk menghasilkan uang dalam jangka waktu tertentu, ini mencakup anggaran pendapatan dan belanja, dan anggaran modal, yang menunjukkan apakah objek dibelanjakan aktiva tetap yang bermanfaat dalam aktivitas operasionalnya, seperti bangunan, peralatan, kendaraan, dan lainnya yang masa utilitas-nya lebih dari satu tahun.

Tujuan dan Karakteristik Anggaran sektor Publik

(Halim, 2016), anggaran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menggapai target pemberian bantuan kepada khalayak untuk memajukan kesejahteraan anggaran. Ini karena anggaran dicatat dalam satuan keuangan, memiliki jangka waktu yang dibatasi, berisikan tanggung jawab untuk mencapai target awal, usaha terpaut anggaran butuh diperiksa dan memprioritaskan kesepakatan oleh pelaksana yang mempunyai otoritas terikat, dan hanya disusun setelah persetujuan pihak yang memiliki otoritas.

Kinerja Sektor Publik

Sebuah organisasi dapat dinilai oleh masyarakat melalui pengukuran kinerja sektor publik, yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan yang ditawarkannya. Akibatnya, organisasi dapat berkembang dan memperbaiki kekurangannya untuk menjadi lebih baik.

Good Governance

Untuk mewujudkan manajemen yang baik dalam *central government* atau pedesaan, lembaga sektor publik wajib dilaksanakan dengan efisien dan memiliki manajemen yang baik

dalam segala aspeknya. Menurut (Mardiasmo, 2018) manajemen yang baik terdiri dari tiga poin utama: transparansi, akuntabilitas, dan nilai uang (*Value for Money*).

Value for Money (VRM)

Teori ini terdiri dari tiga poin utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ini karena keahlian tidak dapat diukur hanya menurut hasil, tetapi perlu memperhitungkan banyak aspek. VRM sangat esensial dan merupakan bagian penting dari evaluasi keahlian, yang harus dipusatkan untuk mengukur ketiga poin utamanya (Mahmudi, 2016).

VRM ini meningkatkan kesadaran pengelola atas dana publik dan meningkatkan transparansi publik untuk menambah pelayanan sesuai target. Parameter VRM terdiri dari biaya yang harus ekonomis dan efektif serta terikat dengan keterampilan fasilitas. Hal ini mampu digapai dengan mengevaluasi input yang wajib dimanfaatkan, umumnya menggunakan rumus:

1. Rasio Ekonomi

Tingkat rasio ini memerlukan biaya pengeluaran serta kenyataan yang ada dilapangan, dengan tingkat lebih dari 100% menunjukkan bahwa penelitian itu tidak ekonomis, dan tingkat di bawah 60% menunjukkan bahwa penelitian itu sangat ekonomis. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \text{Pengeluaran Instansi} / \text{Anggaran yang ditetapkan} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi

Penilaian yang berkaitan dengan pertimbangan tingkat masukan dan keluaran dengan bukti yang dibutuhkan untuk menentukan rasio ini adalah realisasi biaya yang terlibat dalam kegiatan mendapatkan penghasilan, dengan kriteria lebih dari 100% menunjukkan hasil yang kurang efisien, sedangkan kriteria dibawah 60% menunjukkan kinerja sangat efisien. Efisiensi dapat diukur oleh:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \text{Biaya Perolehan Pendapatan} / \text{Realisasi Pendapatan} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas

Untuk perhitungan ini, data sasaran penghasilan harus dikumpulkan. Jika nilainya melebihi 60% itu dianggap sangat efektif, dan jika lebih dari 100%, itu dianggap tidak efektif. Nilai-nilai ini dapat dihitung dengan cara berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \text{Realisasi Pendapatan} / \text{Target Pendapatan} \times 100$$

Berikut ini adalah Laporan Realisasi Anggaran RSUD Prov. NTB tahun 2020-2022:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran RSUD Prov. NTB tahun 2020-2022:

Keterangan	Anggaran 2020	Realisasi 2020
Pendapatan	210.585.397.887	288.677.982.256
Belanja Langsung	113.142.856.003	107.835.613.516
Belanja Tidak Langsung	292.678.058.061	275.637.422.980
Surplus	-	-
Defisit	195.523.516.177	94.795.054.239
Keterangan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
Pendapatan	194.492.867.000	276.858.816.276
Belanja Langsung	321.277.168.407	41.727.497.967
Belanja Tidak langsung	363.664.513.006	386.407.245.473
Surplus	-	-
Defisit	490.448.814.413	151.275.927.163
Keterangan	Anggaran 2022	Realisasi 2022
Pendapatan	321.434.430.500	397.363.379.058
Belanja Langsung	556.088.100.080	541.613.629.428
Belanja Tidak langsung	396.552.029.168	463.200.935.388
Surplus	-	-
Defisit	631.205.698.748	607.451.085.758

Source; Website RSUD Prov. NTB (Nusa & Barat, 2010)

Tabel di atas menyatakan realisasi anggaran mulai tahun 2020 hingga 2022. Dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara realisasi dan anggaran lantaran nilai realisasi lebih meningkat dari anggaran. Akibatnya, anggaran yang diperhitungkan kurang, yang dikenal sebagai "defisit" masing-masing tahunnya. Dalam APBN suatu entitas, hal-hal penting yang harus diperhatikan ialah nilai ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Konsep "*Value for Money*" berfungsi sebagai jalan menuju pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Permen (Peraturan Menteri) Keuangan Nomor 214 tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Riset ini meneliti kapasitas keuangan menggunakan teori *value for money* (efesiensi, efektivitas, dan kualitas ekonomis). Penelitian ini berfokus pada anggaran BLUD RSUD Provinsi NTB dan implementasinya. Analisis perhitungan rasio digunakan untuk penelitian ini, setelah itu diberikan penjelasan dan ditarik kesimpulan. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, yang didasarkan pada tingkat rasio dengan konsep VRM (Mahsun, 2013).

Penelitian ini berfokus pada BLUD RSUD Pro. NTB. Fokus penelitian adalah rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam implementasi anggaran BLUD RSUD Prov. NTB tahun anggaran 2020-2022.

Data sekunder yang digunakan dalam riset ini berasal dari dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Realisasi Anggaran BLUD RSUD Prov. NTB. Sumber lain dari data sekunder ini termasuk memo atau penyimpanan, publikasi pemerintah, *web*, dan dalam jaringan. Dapat diakses secara langsung melalui *website* resmi PPID RSUD Prov. NTB, situs ini berisi gambaran umum organisasi, informasi tentang pelayanan, informasi keuangan, dan berbagai fasilitas.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian penulis tentang hal-hal berikut:

1. Mengumpulkan data dan membandingkannya dengan peraturan;
2. Meneliti kekurangan dan kelebihan proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi;
3. Mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Rasio Ekonomi BLUD RSUD Prov. NTB tahun 2020-2022

Tahun	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Rasio Ekonomi
2020	Belanja Langsung	113.142.856.003	107.835.613.516	95,31%
	Belanja Tidak Langsung	292.678.058.061	275.637.422.980	94,18%
	Total Belanja	405.820.914.064	383.473.036.496	94,49%
2021	Belanja Langsung	321.277.168.407	41.727.497.967	12,99%
	Belanja Tidak Langsung	363.664.513.006	386.407.245.473	106,25%
	Total Belanja	684.941.681.413	428.134.743.440	62,51%
2022	Belanja Langsung	556.088.100.080	541.613.629.428	97,40%
	Belanja Tidak Langsung	396.552.029.168	463.200.935.388	116,81%
	Total Belanja	952.640.129.248	1.004.814.564.816	105,48%
	Rata-Rata	340.567.120.788	302.737.057.459	88,89%

Tabel 3. Perbandingan Rasio Ekonomi tahun Anggaran 2020-2022

Jenis Belanja	Rasio Ekonomi		
	2020	2021	2022
Belanja Langsung	95,31%	12,99%	97,40%
Belanja Tidak langsung	94,18%	106,25%	116,81%
Total Belanja	94,49%	62,51%	105,48%

Rasio ekonomi pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan drastis dengan total sebesar 94,49% ke 62,51%, namun mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 sebesar 105,48%. Pada pembahasan diatas sesuai golongan ekonomis, kondisi BLUD RSUD Prov. NTB dalam realisasi anggaran ekonomisnya yang terbatas. Kesimpulan dari perhitungan rasio ekonomi BLUD RSUD Prov. NTB tahun 2020-2022 menunjukkan adanya fluktuasi dalam nilai rasio ekonomi selama periode tersebut. Rasio ekonomi merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu lembaga, dan fluktuasi nilai rasio ekonomi dapat mengindikasikan perubahan dalam efisiensi pengelolaan anggaran RSUD Prov. NTB.

Tabel 4. Rasio Efisiensi BLUD RSUD Pro. NTB tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi
2020	383.473.036.496	288.677.982.256	132,84%
2021	428.134.743.440	276.858.816.276	154,64%
2022	1.004.814.564.816	397.363.379.058	252,87%

Rasio efisiensi menunjukkan bahwa BLUD RSUD Prov. NTB dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi, dengan nilai di atas 100% pada tahun 2020 dan 2021, tetapi meningkat secara signifikan di atas 200% pada tahun 2022. Dimana perhitungan rasio efisiensi setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 132,84%, 154,64%, dan 252,87%, tanpa ada penurunan sedikit pun sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran RSUD Prov. NTB tidak efisien. Hal ini menunjukkan variasi dalam efisiensi pengelolaan belanja dan pendapatan RSUD Prov. NTB selama periode tersebut.

Tabel 5. Rasio Efektivitas BLUD RSUD Pro. NTB tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas
2020	288.677.982.256	210.585.397.887	137,08%
2021	276.858.816.276	194.492.867.000	142,35%
2022	397.363.379.058	321.434.430.500	123,62%

Pada tabel rasio efektivitas menunjukkan bahwa BLUD RSUD Prov. NTB mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2022, dengan nilai di atas 100% pada tahun 2020 dan 2021, tetapi turun pada tahun 2022. Dengan hasil berurut dari tahun 2020 sebesar 137,08%, 142,35%,

dan 123,62%. Rasio ini telah mencapai nilai diatas 100% dan secara umum kinerja keuangan BLUD RSUD Prov. NTB termasuk kedalam kategori efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian pada Analisis Laporan realisasi Anggaran RSUD Prov. NTB dari tahun 2020 hingga 2022 menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan nilai uang, penelitian ini menyoroti pentingnya faktor-faktor ini dalam meningkatkan pengelolaan keuangan RSUD di Provinsi NTB. Dengan memeriksa laporan realisasi anggaran, penelitian ini berusaha berkontribusi pada pemahaman proses manajemen anggaran yang efektif dan efisien di sektor publik untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik. Maka dapat disimpulkan pencapaian kinerja tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang telah diserasikan dengan peraturan yang ada dan setelah dibuat tafsiran, kemudian dapat disimpulkan bahwa;

1. Realisasi Anggaran di RSUD Prov. NTB kurang ekonomis.
2. Realisasi Anggaran di RSUD Prov. NTB tidak efisien.
3. Realisasi Anggaran di RSUD Prov. NTB efektif.

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan pada penelitian diatas adalah;

1. RSUD Prov. NTB dapat melakukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi dalam rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
2. Menggunakan metode analisis yang lebih kompleks dan mendalam dalam perhitungan rasio, serta cakupan data yang luas untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan mendetail.
3. Membandingkan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas BLUD RSUD Prov. NTB dengan standar atau benchmark yang relevan untuk mengevaluasi kinerja keuangan secara lebih komperhensif
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perhitungan rasio untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait dengan perubahan kinerja keuangan RSUD Prov. NTB dari waktu ke waktu.
5. BLUD RSUD Prov. NTB dapat mampu meminimalisir pengeluaran dan mampu mengoptimalkan pendapatan.
6. Mempertimbangkan capaian efektivitas untuk kedepannya dengan meningkatkan pelayanan kesehatan serta realisasi pendapatan setiap tahunnya.

DAFTAR REFERENSI

- Bastian. (2006). Sistem akuntansi sektor publik (Edisi 2). Salemba Empat.
- Halim, A. (2016). Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2013). Pengukuran kinerja sektor publik. BPFE.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Nusa, P., & Barat, T. (2010). Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029.
- Syaifanur, F., & Saleh, M. (2022). Based on the performance measurement of the Minister of Finance Regulation number 214 of 2022. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 7(2), 252-258.